

SINOPSIS

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diletakkan sebagai kebijaksanaan. Namun, didalam pengalaman praktik selama ini, justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam. Kemiskinan adalah sebab dari kerusakan lingkungan, maka pembangunan menghalau kemiskinan bisa berjalan seiring dengan perbaikan lingkungan hidup. Pemerintah, sampai saat ini masih bertumpu pada sistem pengelolaan lingkungan yang bersifat sektoral dan tumpang tindih. Pemerintah juga belum memaksimalkan proses penegakan hukum pidana terkait pengelolaan sumber daya alam, akibatnya keterlibatan oknum-oknum pemerintah dan aparat dalam melindungi dan mengamankan aktifitas bisnis legal maupun ilegal yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam tetap dominan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan advokasi WALHI dalam pembangunan lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006..

Penelitian ini dilakukan di Propinsi DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai peran WALHI dalam pembangunan lingkungan di Propinsi DIY. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian peran WALHI dalam pembangunan lingkungan di Propinsi DIY ditunjukkan dengan melakukan kegiatan advokasi terhadap kasus-kasus lingkungan yang terjadi di wilayah Yogyakarta yaitu : 1) Kawasan merapi yaitu dengan menolak pembangunan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berdasarkan SK Menhut 134 tahun 2004 melalui pengajuan gugatan yang berada ditingkat kasasi Mahkamah Agung. 2) Pengorganisasian dan advokasi lingkungan terhadap penambangan pasir di Merapi di wilayah Cangkringan yaitu dengan memperkuat forum masyarakat peduli merapi untuk penanganan bencana merapi serta sarasehan Kearifan Lokal Pengelolaan Merapi. 3) Melakukan konsolidasi kawasan dan menyusun program pengelolaan kawasan perkotaan yaitu dengan melakukan investigasi sistem Pengolahan Limbah di Jogjakarta, pembuatan Film kawasan perkotaan, advokasi Pengelolaan Sampah Perkotaan, serta advokasi pengelolaan Sub DAS di Perkotaan. 4) Advokasi lingkungan di Pesisir Selatan yaitu dengan melakukan pengorganisasian dan penguatan kapasitas masyarakat, perencanaan program kawasan pesisir selatan propinsi DIY, road show dan pendampingan di 3 kabupaten untuk perencanaan dan implementasi program pengelolaan pesisir selatan, workshop pengelolaan pesisir selatan terkait isu pertambangan, pariwisata, pertanian, dan mitigasi bencana, melakukan publik hearing rencana tambang pasir besi di Pesisir Selatan serta pengkritisan AMDAL Pelabuhan IKAN Pantai Glagah.

Saran dalam penelitian ini adalah 1) WALHI perlu melakukan konsolidasi dan pembenahan organisasi dan kelembagaan dengan cara merumuskan ulang struktur, tata cara dan sistem kerja organisasi kearah yang lebih sistematis, berdisiplin, terorganisir dan dipimpin dengan tetap mangacu kepada manifesto dan statuta WALHI, 2) perlunya perbaikan di tingkat koordinasi dengan anggota, pembagian kerja, membentuk pola hubungan kerja yang harmonis, agar mampu meningkatkan hubungan emosional antar anggota yang nantinya berpengaruh besar dalam menunjang kinerja WALHI, 3) WALHI sebagai organisasi advokasi lingkungan berbasis massa diharuskan memiliki tiang penyangga organisasi yang kuat yaitu pembinaan terhadap kekuatan Kader WALHI.